

TAJUK RENCANA

Hari Santri di Tengah Pandemi

KAMIS 22 Oktober 2020 kemarin umat Islam Indonesia merayakan Hari Santri Nasional (HSN). Pemerintah Indonesia menetapkan setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional sebagai pengakuan dan penghargaan kaum santri atas perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka telah berkorban jiwa dan raga untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Puluhan ribu kaum santri telah gugur demi ibu pertiwi.

Meski semangat patriotik yang dikobarkan oleh Hadlatusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari melalui Resolusi Jihad atau perintah berjihad ini sudah berlangsung 75 tahun lalu, namun kiranya masih harus terus dilanjutkan hingga saat ini untuk membentengi negeri tercinta ini dari berbagai macam ancaman. Kini, para santri era milenial juga harus terus berjuang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tantangan yang ada saat ini.

Sebagaimana kita ketahui, musuh bersama saat ini adalah virus Corona atau Covid-19. Meski kita sudah melakukan berbagai upaya hingga lebih tujuh bulan selama masa pandemi ini, namun tampaknya belum membuahkan hasil yang menggembarakan. Hal ini terlihat dengan terus bertambahnya jumlah anak bangsa yang terparap virus Corona, bahkan ribuan di antaranya sudah meninggal kita semua. Karena itu, semua ini merupakan tantangan kita semua, termasuk para kaum santri, untuk bersama-sama melawannya, khususnya menghentikan penyebaran virus yang mematikan ini, sehingga sirna dari bumi pertiwi.

Kaum santri termasuk elemen penting dalam menghadapi wabah ini. Sebab, jumlah mereka sangat banyak. Mereka juga terkumpul dalam pondok-pondok pesantren se-Indonesia, yang kalau sampai terlena bisa ada pesantren yang menjadi klaster baru dalam penyebaran virus ini. Karena itulah, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan harus dipatuhi. Kalau ini terjadi, justru pe-

santren bisa menjadi contoh bagi dunia pendidikan dalam mengatasi pandemi ini.

Bagi kalangan santri, penerapan protokol kesehatan sebenarnya sudah menjadi bagian hidupnya sejak dulu kala. Lihat saja, tempat-tempat cuci tangan sebenarnya sudah biasa ada di lingkungan pondok pesantren, di samping adanya tempat wudhu di sekitar masjid. Di depan kediaman pengasuh atau kiai, biasanya juga ada kran air mengalir untuk cuci tangan dan kaki sebelum *sowan* kiai, baik para santri maupun tamu yang datang.

Dari sisi ajaran agama, sebenarnya kebersihan sudah diajarkan, bahkan dalam ilmu fiqh masalah kebersihan atau *thaharah* selalu berada di bab pertama, baru bab-bab untuk bidang lainnya. Anjuran untuk terus menerapkan perilaku bersih dan sehat juga terus ditanamkan. Antara lain melalui semboyan *an-nadhofatu minal iman* yang artinya kebersihan itu bagian dari keimanan. Juga ada ungkapan, *al-'aqlus-saliim fi jismis-salim* yang artinya akal yang sehat berada pada fisik yang sehat juga, atau arti luasnya 'di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat'.

Karena itu tepat sekali momentum Hari Santri Nasional 2020 ini mengangkat tema 'Santri Sehat, Indonesia Kuat'. Harapannya, para santri se-Indonesia benar-benar menerapkan perilaku atau pola hidup yang bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di manapun saja dan kapan pun juga. Kalau hal ini sudah dijalankan, maka para santri akan sehat semua dan ini mempunyai sumbangsih besar untuk menguatkan Indonesia. Di sinilah letak perjuangan yang harus dilakukan para santri era masa kini.

Selamat Hari Santri Nasional 2020. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa terus melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker plus senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Yakinkan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permohonan hamba-hamba-Nya. □

Pandemi, Stunting dan Debat Pilkada

Fadmi Sustiwi

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan aksi global yang dipakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan SDGs memfokuskan pada mencari solusi berkelanjutan untuk menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi hingga tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

Tidak dipungkiri, realita kekurangan gizi, anemia ibu hamil bahkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang tinggi seakan masih menjadi 'hantu'. Kini, Indonesia bahkan menghadapi realita lebih memprihatinkan. Riskesdas 2013 mengungkap, tingkat prevalensi stunting yang memprihatinkan. Pasalnya, anak laki-laki pendek pada umur 13 tahun mencapai 40,2%, sementara pada anak perempuan umur 11 tahun tercatat 35,8%.

Pandemi Covid-19, telah memperparah keadaan dan upaya perbaikan masalah tersebut. Fakta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), berhentinya nadi kehidupan ekonomi di banyak sektor, membuat banyak persoalan yang mengakibatkan turunnya pemberian gizi ibu hamil dan anak. Jika Gunungkidul mendeklarasikan percepatan penanganan stunting, tentu patut diapresiasi. (KR, 19/10)



Seakan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan seterusnya hanyalah merupakan persoalan pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan sejenisnya.

Pemimpin Transformatif

Hampir di seluruh daerah, perempuan memilih jumlahnya imbang dengan laki-laki bahkan tidak sedikit yang lebih tinggi. Karenanya, suara perempuan mutlak untuk didengarkan, agar kelak pemimpin bisa mengurai persoalan yang dihadapi bangsa. Bukankah Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah wabah, tetap harus mampu melahirkan pemimpin transformatif yang bisa membawa daerah ke luar dari krisis?

Keberpihakan penyelenggara, tim penyusun materi debat pilkada menjadi sangat penting. Kepiawaian memasukkan isu perempuan serta melihat perspektif perempuan paslon dalam melihat problema daerahnya, menjadi sesuatu yang tidak bisa dia-baikan. Tidak semata-mata jumlah perempuan pilih yang setara. Namun juga untuk memahami kemampuan paslon melihat persoalan bangsa yang dihadapi perempuan di wilayahnya.

Semua program yang berakar ketidakadilan jender seyogianya dilihat dari 4 aspek: akses, partisipasi, manfaat dan kontrol. Dan bagaimana paslon melihat permasalahan yang dihadapi perempuan di wilayahnya, dengan perspektif kesetaraan jender? Dari kepiawaian mengulik pertanyaan inilah, masyarakat akan bisa mengetahui kemampuan paslon memahami serta mengelaborasi persoalan perempuan di daerahnya. □

*) **Fadmi Sustiwi**, wartawan pemerhati kesetaraan jender

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kehamilan adalah kodrati perempuan dan anemia ibu hamil hanya dialami perempuan. Namun bangsa ini tidak bisa memandang bahwa persoalan anemia ibu hamil, AKI melahirkan hingga stunting hanyalah sebagai persoalan perempuan. Mengingat semua ini sangat berkaitan erat dengan penyediaan SDM emas.

Masa Kampanye

Pilkada kali ini mencatatkan sebanyak 159 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meliputi 2 calon gubernur, 70 calon bupati, dan 15 calon wali kota. Selain itu, ada 3 calon wakil gubernur, 58 calon wakil bupati, dan 11 calon wakil wali kota berjenis kelamin perempuan. Hanya perlu dimengerti, perempuan kandidat tidak serta-merta punya program yang berpihak pada isu-isu pe-

yang mengatur pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 telah memuat sejumlah materi yang harus dibahas dalam debat kandidat. Materi debat mencakup pembahasan visi dan misi calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian menyelesaikan persoalan daerah, menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebangsaan.

Materi debat bisa jadi sangat umum. Sebagaimana 'kebiasaan', perspektif dan isu perempuan tidak dimasukkan secara spesifik dalam muatan debat antarcalon.

Masa Depan BUMDes Pasca-UU Cipta Kerja

Azsep Kurniawan

DI TENGAH hiruk pikuk UU Cipta Kerja terselip pasal terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pasal 117 ditegaskan bahwa BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum. Legalitas BUMDes yang sebelumnya disahkan melalui Peraturan Kepala Desa kini diperkuat dalam Undang-Undang (UU). Status badan hukumnya persis sama dengan PT atau Koperasi yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai badan hukum.

Ada dua semangat yang diusung UU Cipta Kerja ketika BUMDes berbadan hukum. Pertama, kemudahan melakukan kerja sama bisnis dengan pihak manapun. Selama ini, kalau BUMDes mau melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan, kadang terhambat urusan legalitas karena status belum berbadan hukum. Bahkan ada yang meminta BUM Desa harus didaftarkan ke notaris agar bisa sah secara hukum. Bukankah Kepala Desa juga pejabat negara yang statusnya sama dengan notaris di hadapan hukum?

Kedua, kemudahan akses permodalan lembaga keuangan. Ketakutan perbankan memberi pinjaman kepada BUMDes karena ketidakpercayaan apakah ada pihak yang bertanggungjawab dengan risiko keuangan. Kepada pihak mana perbankan bisa menuntut kalau terjadi penyelewengan? Bagaimana kalau Desa tidak bertanggungjawab? Dengan status badan hukum, maka BUMDes bisa dituntut secara perdata apabila melakukan penyelewengan keuangan.

Bisa Berubah

Angin segar dari klaster kemudahan berusaha juga ada pasal 109 UU Cipta Kerja. Ada kemudahan bagi BUMDes untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Unit-unit usaha BUMDes bisa berubah

menjadi PT. Tentu ketika berubah menjadi PT, peluang memperoleh suntikan modal dari investor akan semakin terbuka.

Tidak serta merta semua BUMDes harus segera mengajukan status badan hukumnya. Percuma saja, status badan hukum yang disematkan, kalau sekadar administratif dan papan nama. Apalagi status badan hukum hanya dibuat untuk menengadahkan tangan berbagai kurungan bantuan, ini tentu menyedihkan.

Berdasarkan hasil uji petik BPK terhadap 8.220 BUMDes menunjukkan, sebanyak 2.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa. Temuan BPK tersebut ada pada Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2018. Dengan kondisi tersebut di atas maka BUMDes harus mawas diri. Tidak semua BUMDes mempunyai tata kelola yang baik. Secara kuantitas pertumbuhan BUMDes dari tahun 2014-2019 cukup tinggi yaitu 50.199. Dari total desa di Indonesia sebanyak 74.957 desa, berarti hampir 67% sudah ada BUMDes. Namun hanya ada sekitar 37.000 BUMDes yang aktif. Ternyata setelah pandemi, hanya ada 10.600 yang melakukan transaksi.

Saat unit usaha BUMDes sudah berbentuk PT, tidak lagi terikat ketentuan sebagian besar modal harus dimiliki desa. PT harus tunduk pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Siapapun bisa membeli saham yang ditawarkan. Semakin besar saham maka semakin besar pula devidennya. Keputusan tertinggi dalam PT ada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bukan lagi musyawarah desa.

Keuntungan

Ketika usaha BUMDes semakin menggurita dan massif, tentu banyak keuntungan masuk dari pemodal. Ruh BUMDes dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semangat kegotongroyongan dalam memperdayakan perekonomian desa. Jangan sampai masyarakat desa hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Maka watak BUMDes tidak sekadar *profit oriented* tetapi juga *social solutive*.

Jangan sampai wajah luar seolah-olah BUMDes namun didalamnya hanya dikuasai perorangan atau segelintir pihak yang punya kapital. Tentu setiap desa punya kearifan lokal.

*) **Azsep Kurniawan**, *Fungsional PSM di BBLM Yogyakarta*

Pojok KR

150.000 pekerja belum terima BSU.
-- **Harus segera disalurkan.**

Libur panjang, DIY perketat Prokes.
-- **Jangan jadi klater baru Covid-19.**

Politik uang Pilkada harus dilawan.
-- **Harus diawali kesadaran para calon.**

Berabas



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotocopy atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Menyeimbangkan PD dan PIKI Guru

GURU merupakan profesi yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan Indonesia, yaitu menghasilkan manusia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Untuk melaksanakan jabatan profesi guru perlu pembinaan dan pengembangan profesi secara terprogram dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung tugasnya mewujudkan terbentuknya guru yang profesional. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan guru adalah mengikuti pelatihan atau workshop sebagai bentuk pengembangan diri.

Forum Guru Sleman Menulis bekerja sama dengan Dinas pendidikan Kabupaten Sleman menyelenggarakan workshop menulis kisah inspiratif guru yang dilaksanakan Sabtu, 17 Oktober 2020 di Puri Mataram, Jalan Drono Tridadi, Sleman. Workshop tersebut diikuti 50 orang guru TK, SD, dan SMP Kabupaten Sleman. Kegiatan pela-

tihan tersebut dihadiri pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sleman.

Kegiatan workshop dibuka oleh Kepala Dinas Kabupaten Sleman Drs Ery Widaryana MM. Dalam sambutannya diharapkan para guru lebih aktif dan kreatif mengikuti kegiatan pelatihan untuk pengembangan diri (PD) guru. Para pendidik jangan hanya menunggu undangan dari dinas untuk mengikuti pelatihan, namun harus kreatif mencari kegiatan pengembangan diri guru. Untuk kenaikan pangkat guru, selain PD guru juga harus melakukan pengembangan profesi (PIKI). Keduanya harus seimbang dan memenuhi syarat untuk pengembangan profesi dan karier guru.

Selain menerima materi tentang penulisan kisah inspiratif guru yang disampaikan oleh Dwi Suwignya sebagai nara sumber, peserta workshop juga diharapkan mampu menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku. Hal ini dilakukan agar para guru tergerak berkarya untuk mendukung pengembangan profesinya.

Suprapti Guru SDN Kenaran 1, Prambanan, Sleman.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Pemimpin Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. **Romy Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry23@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display.. Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga..Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.